PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

The use of digital technology in enhancing financial accountability and transparency at the Regional Financial Agency of Parepare City.

[1]Rosmayani, [2]Arham, [3]Fitriyani syukri, [4]Fatimah, [5]Yadi Arodhiskara

Email: rosmayani454@gmail.com [1*], Arham83rockt@gmail.com [2], fitriyanisyukri19@gmail.com [3] fatimahumpar11@gmail.com [4], yadhi01@gmail.com

[1] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare [2.3]Program Studi ManajemenFakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Era digital telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam cara pengelolaan keuangan daerah. Dengan kemajuan teknologi digital, muncul tantangan dan peluang baru dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Parepare, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Dengan kesimpulan, penerapan teknologi digital di Kantor Badan Keuangan Daerah telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Parepare.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Teknologi Digital, Transparansi

Abstract

The digital era has brought significant changes in many aspects of life, including the way regional finances are managed. With the advancement of digital technology, new challenges and opportunities have emerged in efforts to enhance accountability and transparency in regional finances.This study aims to identify the impact of digital technology in improving accountability and transparency in the regional finances of Parepare City. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collection methods such as observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of digital technology has a positive impact on the quality of financial reports for the Parepare City government, with the goal of improving the accountability and transparency of the Parepare City Regional Finance Agency. In conclusion, the application of digital technology at the Parepare City Regional Finance Agency has played a significant role in supporting accountability and transparency in the management of the regional government's finances in Parepare City.

***Keywords :** Digital Technology, Accountability, Transparency* **c**

Journal AK-99 ISSN : 2776726
Volume 4 Nomor , November 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mencapai kemajuan yang signifikan dan telah menyentuh berbagai bidang, termasuk sektor keuangan pemerintah. Teknologi digital, seperti Banyak implementasi sistem informasi keuangan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di berbagai negara. Berbagai aspek kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh era digital termasuk pengelolaan keuangan daerah Kota Parepare, sebagai Salah satu kota di Indonesia dipengaruhi oleh hal ini. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, Tantangan dan peluang baru muncul dalam upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Failany & Fahriani, 2024). Perkembangan teknologi yang semakin pesat berpengaruh pada banyak aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi dan juga bisnis. Persaingan antar usaha menjadi semakin ketat. semakin berkembangnya suatu usaha agar dapat bersaing dalam pasar sebuah usaha dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja, mutu pelayanan dan ketepatan data. Selain itu suatu usaha harus memiliki informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Untuk mendapatkan informasi yang demikian, dibutuhkan sistem informasi yang baik dan tepat. Karena sistem informasi yang baik saja tidak cukup, sistem tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut (fatimah Rappang, n.d.)

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik menjadi isu penting dalam pemerintahan daerah (Oki et al., 2020). Sebagai salah satu wilayah yang menerapkan teknologi digital dalam pengelolaan keuangannya, berpotensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, efektivitas penerapan teknologi ini perlu diteliti lebih lanjut. Namun demikian, pemerintah seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan secara transparan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

Prinsip transparansi adalah Untuk memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses informasi mengenai kegiatan pemerintah. Informasi yang dapat diakses oleh publik berasal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Laporan dibuat. berdasarkan informasi dari prinsip-prinsip dasar. Mereka yang membutuhkan dapat mendapatkan informasi tentang kebutuhan masyarakat dengan cara yang bijaksana. berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Informasi Publik Tahun 2008. Menurut peraturan tersebut, transparansi, yang juga dikenal sebagai keterbukaan, adalah prinsip yang dapat memastikan bahwa masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses informasi.

Melalui latar belakang Penelitian ini akan berbicara lebih lanjut tentang penggunaan teknologi digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah Kota Parepare. Analisis tentang potensi, tantangan, dan strategi yang diperlukan akan dibahas secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang efektivitas teknologi digital sebagai alat bantu transparansi keuangan dan manajemen publik, yang lebih akurat dan dapat di dipertangjawabkan.

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif pengelolaan dan pegaplikasian pada penggunaan teknologi serta hasil wawancara dengan 4 informan. Data utama untuk penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan subjek yaitu pimpinan dan staf badan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan. Agar penerapan teknologi digital dapat berjalan dengan lebih efektif, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur teknologi yang mendukung sistem keuangan digital.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Studi yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menemukan data dan informasi tentang penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bagaimana Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital dalam operasinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur keuangan setiap daerah di Indonesia, termasuk Kota Parepare. Menurut wawancara, pengelolaan keuangan di setiap daerah, khususnya di Badan Keuangan Daerah, dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 memastikan bahwa seluruh tahapan ini dilakukan dengan baik dan efisien. Dengan bantuan teknologi digital, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih jelas, akuntabel, dan efektif.

Empat informan dalam penelitian ini adalah staf akuntansi dan pelaporan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare diwawancarai. Informasi yang diberikan oleh informan tersebut meliputi proses pengelolaan keuangan daerah, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan, dan prosedur pelaksanaan tahapan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan melakukan wawancara ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang metode pengelolaan keuangan yang digunakan oleh badan keuangan daerah Kota Parepare dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan dan akuntansi keuangan daerah.

Penerapan teknologi digital di kantor badan keuangan daerah kota parepare menunjukkan sejumlah peningkatan signifikan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu temuan utama adalah kemampuan teknologi digital untuk mengintegrasikan data keuangan dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Integrasi data yang baik ini membantu dalam mempercepat proses audit dan memastikan bahwa laporan keuangan tersedia tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan keuangan pemerintah kota parepare meningkatkan transparansi dan membuatnya lebih mudah diakses oleh publik. Teknologi digital memungkinkan pembuatan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah diakses, baik oleh pemangku kepentingan internal maupun masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap seluruh hasil kinerja dalam mengelolah keuangan daerah.

Penelitian mengenai penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peralihannya ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI). Menunjukkan beberapa kesenjangan yang perlu mendapat perhatian. SIPD awalnya dikembangkan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi di tingkat pemerintah daerah dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Sistem ini membantu dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan, namun sering terkendala oleh proses manual dan integrasi data yang kurang efisien. Sebaliknya, SIPD-RI dirancang dengan teknologi yang lebih canggih, memungkinkan integrasi data lintas sektor dan wilayah secara real-time. Hal ini memungkinkan data diperbarui dan diakses instan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. SIPD-RI juga menambahkan fitur-fitur baru yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, seperti dashboard analitik komprehensif untuk pemantauan kinerja secara langsung. Namun, dalam implementasinya, peneliti menemukan beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan SIPD dan SIPD-RI. Beberapa di antaranya adalah jaringan server yang tidak mendukung pelayanan, proses penginputan data yang sering mengalami keterlambatan karena kendala jaringan, serta penginputan data yang masih dilakukan secara manual, mengurangi efektivitas dan efisiensi sistem. Masalah ini dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintah daerah karena penggunaan sistem yang belum optimal menghambat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. SIPD dan SIPD-RI berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyediakan fitur pemantauan dan pelaporan real-time, analisis kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas. SIPD

memungkinkan pemerintah daerah melakukan pemantauan keuangan daerah secara real-time, menyajikan data keuangan yang akurat dan tepat waktu, dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, SIPD memungkinkan evaluasi anggaran dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan. Sistem ini juga membantu menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan transparansi informasi keuangan dengan menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk memahami dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, SIPD membantu dalam perencanaan anggaran dengan menyediakan informasi historis dan tren keuangan yang relevan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan keuangan dan alokasi sumber daya. SIPD juga berperan dalam pengelolaan risiko dengan membantu identifikasi potensi risiko keuangan dan pengembangan strategi pengelolaannya. Meskipun SIPD-RI menawarkan banyak keunggulan, kesenjangan dalam pelaksanaannya menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi pengguna untuk memastikan sistem ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) dan harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, banyaknya sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah membuat sulit bagi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data yang menggabungkan keuangan antara daerah dan pusat. Dari 524 pemerintah daerah, sebanyak 361, atau 68,89 persen, telah menerapkan sistem informasi keuangan. Namun, 163 dari mereka, atau 31,11 persen, masih tidak jelas atau tidak tahu tentang sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah mereka. Hal ini menciptakan tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena kesulitan dalam mengintegrasikan data dan informasi keuangan dari berbagai daerah untuk analisis yang lebih komprehensif. Namum di pemerintah kota parepare itu sendiri sudah menggunakan SIPD RI sebagai alat untuk melaporkan seluruh belanja yang ada di kota parepare di setia SKPD. Data per Oktober 2012 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih jauh dari seragam.

Terdapat perbedaan dalam penggunaan sistem informasi di setiap pemerintah daerah (pemda). Sebanyak 223 pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), 68 menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan 123 menggunakan sistem yang belum terstandarisasi. Terlebih lagi, 110 pemda mengabaikan sistem informasi sama sekali dalam pengelolaan keuangannya namun menurut PERDA-NO.3-THN-2023 menyatakan bahwa jumlah skpd yang ada di kota parepare berjumlah 34 skpd dan semua sudah menggunakan aplikasi SIPD RI.

KESIMPULAN

Hasil diskusi dan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di Kantor Badan Keuangan Daerah pemerintah Kota Parepare telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi keuangan berbasis digital mampu mempercepat integrasi data keuangan, meningkatkan aksesibilitas laporan, serta memungkinkan pelacakan alur dana secara real-time. Penerapan teknologi digital pada badan keuangan daerah di pemerintah kota parepare sangat berpengaruh besar dalam proses perencanaan hingga pelaporan.

Saran

Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian ini, beberapa saran yang dapat dilakukan di masa depan untuk mendukung penggunaan teknologi digital untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah **.**

1. Diharap penelitian ini dapat menyoroti pentingnya pelatihan bagi staf di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menggunakan teknologi digital. Pemahaman yang memadai tentang sistem dan

aplikasi digital akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan melaporkan keuangan daerah dengan cara yang akurat dan transparan.

2. Diharap untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang aplikasi SIPD RI dengan adanya teknologi yang mendukung di era baru yang ada di Kota Parepare, sehingga perencanaan itu bisa terealisasi sampai ke pelaporan supaya Kota Parepare dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A. (2022). *Analisis dan perancangan sistem informasi pelaporan keuangan badan usaha milik desa berbasis desktop*. *1*(1), 6–13.

Albugis Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, F. F. (2016). Implementation of Regional Financial Accounting System Achieve Transparanency and Accountability in Local Goverentment Finance North Sulawesi Province. *Penerapan Sistem Akuntansi… Jurnal EMBA*, *78*(3), 78–089.

Andi Kusnadi, Fahmi Oemar, & Bambang Supeno. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, *1*(1), 51–63. https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.10

Aprilla, W., Wulandari, M., Elcaputera, A., Hukum, F., & Bengkulu, U. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi kebijakan dan tindakan pemerintah , sementara akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik*. *2*(4).

Budiriyanto, E. (2013). Kajian Legal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). *Kementrian Republik Indonesia*. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf

Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). *Praktek Kerja Lapang Akuntansi Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. *1*(1), 1–6.

Flypaper Effect. (2013). *The New Palgrave Dictionary of Economics, 2012 Version*. https://doi.org/10.1057/9781137336583.0632

Kurniawati, P. (2017). Hasil dan pembahasan. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, *01*, 1–7.

Kushartiningsih, R., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , *10*(3), 1–18.

Muhammad, D. (2019). Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital. *Infokam*, *15*(2), 116–123.

MuhammadAfif Failany1, D. F. (2024). *Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah*. *21*(1), 1–14.

Munawar, Z., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Indah Putri, N. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital Di Masa Pandemi Covid-19. *Tematik*, *8*(2), 160–175. https://doi.org/10.38204/tematik.v8i2.689

Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *3*(2), 92–107. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283

Nugroho, M. A., Kusumawati, F. D., & Buchori, W. P. M. (2024). Peran Digitalisasi Akuntansi Dalam Efisiensi Dan Transparan. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, *4*(1), 32–43.

Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *5*(2), 1–6. http://jurnal.unimor.ac.id/JEP

Perda Persampahan No. 2/2017, P. (2017). *Pemerintah kabupaten mamuju*. *17*, 1–18.

Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, *6*(1), 11–18. https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315

Syachbrani, W., Akuntansi, J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Makassar, U. N. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Bijac: Bata Ilyas Journal of Accounting*, *5*(1), 11–018.

Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *10*(4), 1–24.

Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *8*(1), 1–8. https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455

_____Peraturan daerah nomor 10 tahun 2016. Parepare.

_____Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006.

_____Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

https://keuda.kemendagri.go.id/sipkd#:~:text=Lebih%20jauh%2C%20pada%20Surat%20Edaran,regional%20di%20Provinsi%20Sulawesi%20Selatan.

Dewi Mantasari, Arfianty, A., & Fatimah, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kec. Suppa Kab. Pinrang. *DECISION : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(1), 106–114. https://doi.org/10.31850/decision.v4i1.2133

Rappang, D. (n.d.). *ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PRODUK Product Accounting Information System Analysisat Pt . Pertani (Persero)*. *1*(November 2021), 64–72.

The, I., Accountability, F., Rosoan, O., & Regency, E. (2024). *DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGANDESA ROSOAN KABUPATEN . ENREKANG Analysis Of The Implementation Of The Village Financial System (Siskeudes) In*. *4*(November), 436–447.

https://djpk.kemenkeu.go.id/wp content/uploads/2016/01/Kajian_Legal_SIKD_Ekobudi_Versi2.pdf

\